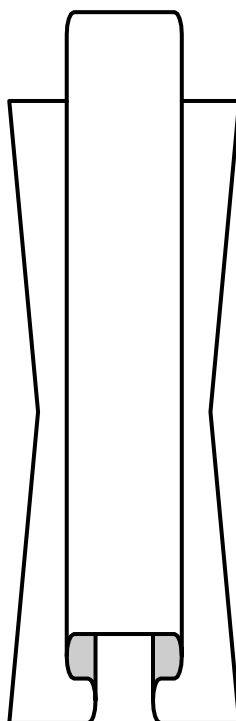




LAPORAN
PELAKSANAAN TUGAS CAMAT JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022



DISUSUN OLEH :
CAMAT JATIPURO

Alamat : Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar

Telp./Fax. (0273) 3201454 Kode Pos 57784

Website : jatipuro.karanganyarkab.go.id. Email : jatipuro@karanganyarkab.go.id.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kami semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya penyusunan materi Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatipuro dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman terhadap tugas-tugas yang telah kami laksanakan sebagai Camat Jatipuro dalam tahun 2022, disamping itu dengan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini kami dapat mengetahui segala kekurangan dan kelemahan yang perlu kami benahi sehingga dimasa-masa mendatang akan dapat diperbaiki.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan materi Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatipuro ini masih jauh dari kesempurnaan tugas yang semata-mata keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada kepada kami, oleh karena itu segala kritik saran sangat kami harapkan dari berbagai pihak untuk lebih menuju kesempurnaan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatipuro.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini.

Jatipuro, 31 Desember 2022

CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP.19760307 199903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
I. BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud Dan Tujuan.....	2
II. BAB II DISKRIPSI UNIT KERJA	
A. Tugas Pokok dan Fungsi	3
B. Standar Operating Procedure (SOP) SKPD	4
C. Perda/Perbup yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	4
D. Struktur Organisasi Sesuai SOT	4
E. Kepegawaian Berdasarkan Urusan yang Dilaksanakan	5
III. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8
IV. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	9
V. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	16
VI. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	17
VII. INOVASI DAN PENGHARGAAN	
VIII. PENUTUP	
A. Kesimpulan	19
B. Saran	20

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan sistem penyelenggara Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, semua unsur di wilayah ini menginginkan terwujudnya *Good and Clean Government*. Semangat Otonomi Daerah sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut dapat memacu pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Prinsip-prinsip pemberian Otonomi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu Pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah.

Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan Perangkat Daerah yang pada dasarnya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selain itu Kecamatan juga mempunyai fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pembinaan pemerintahan desa, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum. Hal ini merupakan implementasi dari penjabaran pelaksanaan Otonomi Daerah.

Camat sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam kewajibannya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan Camat guna mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dalam mensukseskan tugas-tugas pemerintah.

B Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat tahun 2022 ini adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);
- c. Peraturan Bupati Karanganyar nomor 112 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022);
- e. Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2018-2023
- f. Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2022

C Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Tugas dimaksud untuk memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun Anggaran dan merupakan pertanggungjawaban kepada Bupati Karanganyar.

Adapun maksud dan tujuan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Camat adalah sebagai berikut:

- a. Melaporkan langkah-langkah tindakan strategis yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selama satu Tahun anggaran (Tahun 2022).
- b. Melaporkan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai atas Pelaksanaan Tugas selama satu Tahun Anggaran 2022 oleh Camat Jatipuro.
- c. Mengetahui permasalahan dan solusi pemecahan yang bisa dilaksanakan.

BAB II

DISKRIPSI UNIT KERJA

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, pada Bab III Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

- undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - f. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketrentaman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketrentaman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. Standard Operating Procedure (SOP) OPD Kecamatan Jatipuro

SOP Kecamatan Jatipuro Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. SOP Tentang Pelayanan non Perijinan KTP, KK, Akte Kelahiran
- b. SOP Tentang umum SKCK, Pindah Tempat
- c. SOP Tentang Perijinan ,TDG, IUMK

C. Perda/Perbub yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan

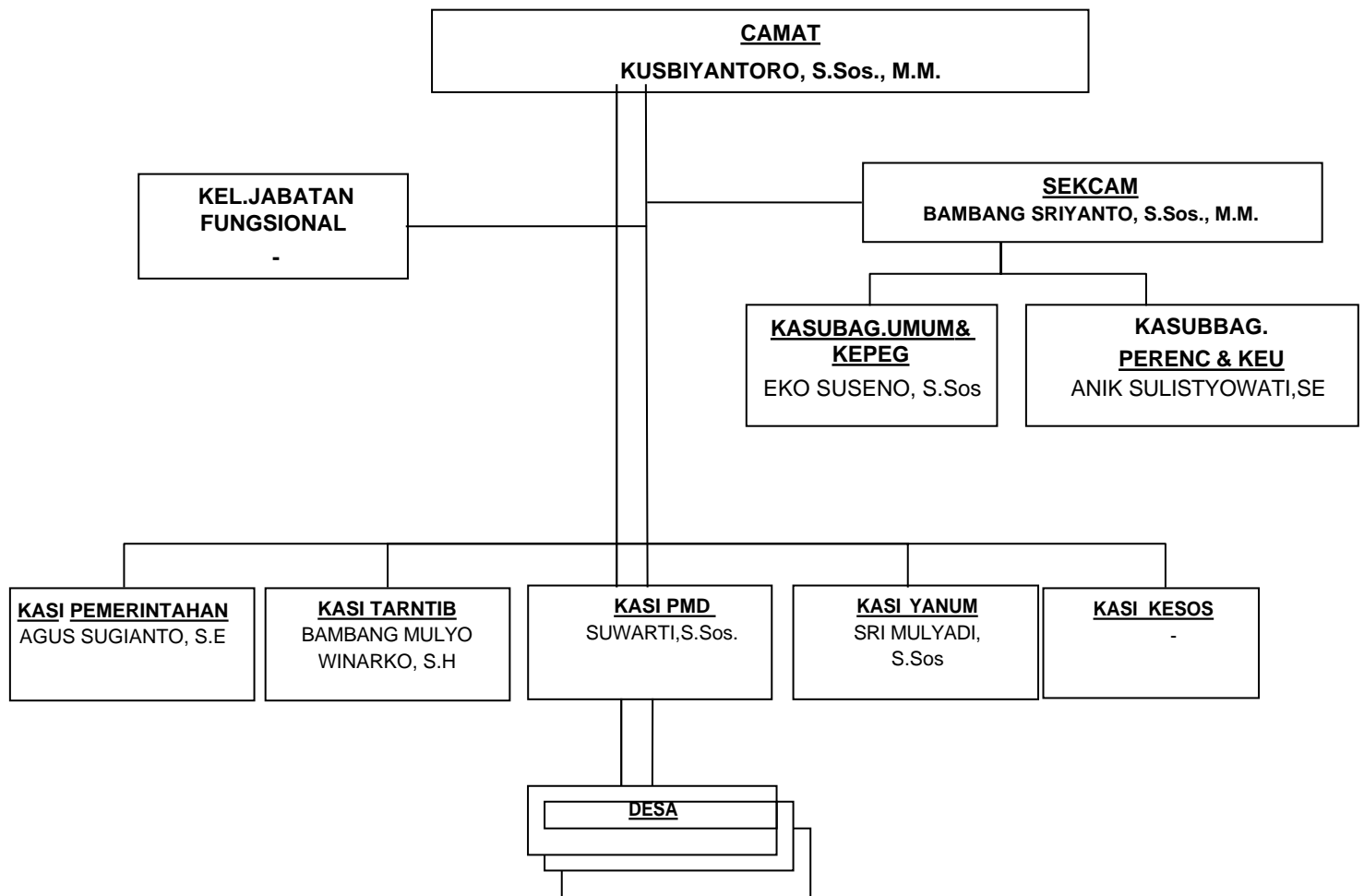
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
- c. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017 Tentang Tugas Jabatan PimpinanTinggi Administrator dan Pengawas Pada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Pimpinan Rakyat, Inspektorat, Kecamatan Dan Staf Ahli Bupati

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar, Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Jatipuro sebagai berikut :



Ket : _____ Garis Komando

----- Garis Koordinasi

E. KEPEGAWAIAN

Kami informasikan bahwa kondisi kepegawaian di Kantor Camat Jatipuro sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Kecamatan Jatipuro Keseluruhan :

NO	NAMA	NIP	STATUS CPNS/PNS	PANGKAT/GOL
1	Kusbiyantoro, S.Sos, M.M.	19760307 199903 1 004	PNS	Pembina, IV/a
2	Bambang Sriyanto, S.Sos, M.M.	19681020 199602 1 004	PNS	Pembina, IV/a
3	Bambang Mulyowinarko, S.H.	19650709 199301 1 002	PNS	Penata Tk.I, III/d
4	Suwarti, S.Sos.	19691119 199002 2 001	PNS	Penata Tk.I, III/d
5	Agus Sugianto, S.E.	19820817 201001 1 032	PNS	Penata Tk.I, III/d
6	Sri Mulyadi, S. Sos	19681210 199003 1 009	PNS	Penata, III/c
7	Anik Sulistyowati ,SE	19721223 199403 2 005	PNS	Penata Tk.I, III/d
8	Eko Suseno, S.Sos	19730706 199802 1 005	PNS	Penata, III/c

9	Sulardi	19690601 199103 1 012	PNS	Penata Muda Tk.I, III/b
10	Joko supriyono	19660607 199403 1 012	PNS	Penata Muda Tk.I, III/b
11	Rudi Prasetyo	19780304 200801 1 013	PNS	Pengatur TK I, II/d
12	Suparno	19820514 201101 1 011	PNS	Pengatur TK I, II/d
13	Kasdi	19790412 200801 1 014	PNS	Pengatur Muda TK I, II/b

2. Jumlah Pegawai Struktural SKPD Yang Terisi :

NO	Nama	Jabatan Struktural	Memenuhi Persyaratan DIKLATPIM	Memenuhi Syarat Kependidikan
1	Kusbiyantoro, S.Sos, M.M.	Camat	V	V
2	Bambang Sriyanto, S.Sos, M.M.	Sekcam	V	V
3	Agus Sugianto, S.E.	Kasi Tapem	-	V
4	Bambang Mulyowinarko, S H.	Kasi Trantib	-	V
5	Suwarti, S.Sos.	Kasi PMD	-	V
6	Sri Mulyadi, S.Sos.	Kasi Yanum	-	V
7	Eko Suseno, S.Sos	Kasubag Umpeg	-	V
8	Anik Sulistyowati, S.E.	Kasubag Perenkeu	-	V

3. Daftar Pejabat Struktural SKPD yang Belum Terisi :

No	Nama	Jabatan Struktural	Esselon
1.	--	Kasi Kesejahteraan Sosial	IV

4. Daftar Pejabat Fungsional Umum :

No	Nama	NIP	Nama Jabatan Fungsional
1	Sulardi	19690601 199103 1004	Pengelola Adm. Peman
2	Joko supriyono	19660607 199403 1 012	Pengelola Data Pelayanan
3	Rudi Prasetyo	19780304 200801 1 013	Pengadministrasi Umum
4	Suparno	19820514 201101 1 011	Bendahara Pengeluaran
5	Kasdi	19790412 200801 1 014	Pengadministrasi Umum

5. Daftar pejabat Fungsional Umum yang belum terisi :

No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Verifikator Keuangan	1
2	Penata Laporan Keuangan	1
3	Pengelola Sarana Prasarana	1
4	Pramu Kebersihan	1
5	Pengelola Kepegawaian	1
6	Petugas Keamanan	1
7	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1
8	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1
9	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1
10	Pengelola Ketertiban	1
	Jumlah	10

BAB IV**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH****A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR***Nihil***B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR***Nihil***C. URUSAN PILIHAN***Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PERBUP NO.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<p><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></p> <p>1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran : Rp. 6.190.000,00 Realisasi : Rp. 6.190.000,00 Persentase : 100%</p> <p>2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran : Rp. 2.530.600,00 Realisasi : Rp. 2.530.600,00 Persentase : 100%</p> <p><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></p> <p>1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar Tusi : Rp. 47.600.000,00 Realisasi: Rp. 47.362.000,00 Persentase : 99,50%</p>	<p>3 Kegiatan</p> <p>12 Bulan</p> <p>34 Pegawai</p>	<p>3 Kegiatan (100%)</p> <p>12 Bulan (100%)</p> <p>34 Pegawai (87,04%)</p>	<p>Efisiensi Penggunaan anggaran Capacity Building</p>	

			<p><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></p> <p>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Anggaran : Rp. 1.755.549.750,00 Realisasi: Rp. 1.575.863.735,00 Persentase : 89,76%</p> <p><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></p> <p>1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Anggaran: Rp. 13.662.000,00 Realisasi: Rp. 13.662.000,00 Persentase : 100%</p> <p>2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran : Rp. 64.698.400,00 Realisasi: Rp. 64.698.400,00 Persentase:(100,00%)</p>	<p>12 Bulan</p> <p>74 Item</p> <p>12 Bulan</p>	<p>12 Bulan (89,76%)</p> <p>74 Item (100%)</p> <p>12 Bulan (100%)</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

			<p>3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 15.356,000,00 Realisasi: Rp. 15.356,000,00 Persentase:(100,00%)</p>	12 Bulan	12 Bulan (100%)		
			<p>4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Anggaran: Rp. 11.039.900,00 Realisasi: Rp. 11.039.900,00 Persentase : 100%</p>	12 Bulan	12 Bulan (100%)		
			<p>5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Anggaran: Rp. 1.980.000,00 Realisasi: Rp. 1.980.000,00 Persentase : 100%</p>	2 Surat Kabar	2 Surat Kabar (100%)		
			<p>6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggaran: Rp. 32.486.000,00 Realisasi: Rp. 32.480.000,00 Persentase : 99,98%</p>	12 Bulan	12 Bulan (99,98%)	Efisiensi Penggunaan anggaran Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi	

				<p><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></p> <p>1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Anggaran: Rp. 33.815.000,00 Realisasi: Rp. 31.495.552,00 Persentase : 93,14%</p> <p>2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase : 100%</p> <p>3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 190.000.000,00 Realisasi: Rp. 189.403.000,00 Persentase : 99,69%</p> <p>4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 160.000.000,00 Realisasi: Rp. 158.916.000,00 Persentase :99,32%</p>	<p>1 Unit</p> <p>2 item</p> <p>1 Unit</p> <p>1 Unit</p>	<p>1 Unit (93,14%)</p> <p>2 Item (100%)</p> <p>1 Unit (99,69%)</p> <p>1 Unit (99,32%)</p>	<p>Efisiensi Anggaran</p>	
--	--	--	--	---	---	---	---------------------------	--

				<p><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <p>1) Penyediaan jasa surat menyurat Anggaran : Rp. 1.060.000,00 Realisasi: Rp. 1.060.000,00 Persentase : 100%</p>	12 Bulan	12 Bulan (100%)		
				<p>2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Anggaran: Rp. 24.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.839.025,00 Persentase : 82,66%</p>	12 Bulan	12 bulan (82,66%)	Efisiensi AnggaranJasa Komunikasi listrik dan air	
				<p>3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Anggaran: Rp. 111.360.000,00 Realisasi: Rp. 111.360.000,00 Persentase: (100%)</p>	12 Bulan	12 Bulan (100%)		

			<p><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p>		
			<p>1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran : Rp. 28.334.000,00 Realisasi: Rp. 28.078.000,00 Persentase: (99,10%)</p>	12 Bulan	12 Bulan (99,10%)
			<p>2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran : Rp. 4.300.000,00 Realisasi: Rp. 4.300.000,00 Persentase: (100%)</p>	5 Item	5 Item (100%)
			<p>3) Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung dan bangunan lain Anggaran: Rp. 119.625.100,00 Realisasi: Rp. 119.322.100,00 Persentase: (99,75%)</p>	2 Item	2 Item (99,75%)

		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<p><i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i></p> <p>1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 5.217.800,00 Realisasi: Rp. 5.217.800,00 Persentase: (100,00%)</p>	12 Bulan	12 Bulan (100%)		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<p><i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i></p> <p>1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 10.000.000,00 Persentase: (100%)</p>	10 Desa	10 Desa (100%)		

				<p><i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i></p> <p>1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Anggaran : Rp. 61.612.200,00 Realisasi : Rp. 61.612.200,00 Persentase : (100%)</p>	12 Bulan	12 Bulan (100%)		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<p><i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i></p> <p>1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 230.720.000,00 Realisasi: Rp. 229.960.000,00 Persentase: (99,67%)</p>	12 Bulan	12 Bulan (99.67%)			

		<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p>	<p><i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i></p> <p>1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)</p> <p>2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase: (100,00%)</p> <p>3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.990.000,00 Persentase: (99,80%)</p>	<p>2 Kegiatan</p> <p>12 Bulan</p> <p>10 Desa</p>	<p>2 Kegiatan (100%)</p> <p>12 Bulan (100%)</p> <p>10 Desa (99,80%)</p>		
--	--	---	--	--	---	--	--

--	--	--

- 4) Fasilitas Pelaksanaan
Tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Anggaran:
Rp. 5.000.000,00
Realisasi:
Rp. 5.000.000,00
Persentase:
(100%)

12 Bulan	12 Bulan (100%)		
----------	----------------------	--	--

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1. TUGAS YANG DITERIMA

Untuk Tugas Pembantuan yang diterima di Kantor Kecamatan tidak ada/nihil.

2. TUGAS YANG DIBERIKAN

Untuk tugas yang diberikan di Kantor Kecamatan tidak ada/nihil.

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan Jatipuro adalah tidak ada atau Nihil

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022

Inovasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro pada Tahun Anggaran 2022

No.	Nama Inovasi	OPD (Inovator)	Diskripsi Inovasi
1	2	3	4
NIHIL			

B. PENGHARGAAN

Penghargaan yang diperoleh oleh Kecamatan Jatipuro pada Tahun Anggaran 2022

No.	Nama Penghargaan	Instansi Penerima	Instansi Pemberi Penghargaan
1	2	3	4

NIHIL

BAB VIII

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Sebagai Perangkat Daerah yang membantu Bupati di wilayah Kecamatan, dalam melaksanakan tugas Camat Jatipuro selalu berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku serta mengkoordinasikan dengan dinas Instansi terkait dalam mengoptimalkan seluruh potensi wilayah.
- b. Sumber Daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam pencapaian program dan kegiatan baik di Kantor Kecamatan maupun di Kantor Kepala Desa.
- c. Komposisi Pegawai PNS dan Perangkat Desa usia tua sangat berpengaruh pada kecepatan proses pencapaian kinerja.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor Kecamatan menjadi salah satu penyebab kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas.
- e. Pengawasan pengendalian dan pembinaan yang dilakukan secara sistematis, Intensif sangat diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah

2. Saran

- a. ~~Sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati di wilayah,~~ dimohon Bupati menambah kewenangan Camat (berdasarkan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 Pelimpahan Kewenangan Desa kelengkapannya) sesuai dengan kondisi di wilayah Kecamatan Jatipuro.
- b. Untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggara Pemerintahan perlu dukungan sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa dari anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupa perbaikan-perbaikan gedung kantor, peralatan kantor, dan penambahan komputer/ laptop serta alat transportasi (kendaraan dinas).
- c. Peningkatan Kapasitas Pegawai sangat diperlukan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- d. Perlunya stimulan bagi Kepala Desa dan petugas pemungut pajak yang bisa memenuhi kewajiban setor pajak lebih awal sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang dilaksanakan.
- e. Perlunya ditingkatkan pembinaan personil berupa Bintek yang diselenggarakan Pemerintah kabupaten untuk Perangkat Desa maupun Staf Kecamatan.
- f. Penambahan Pegawai yang mempunyai kualifikasi khusus seperti ahli Komputer dan Akutansi sangat dibutuhkan di Kantor Camat Jatipuro untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dimana pada saat ini Kantor Camat Jatipuro sangat membutuhkan penambahan pegawai dengan kualifikasi tersebut.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Camat yang kami buat semoga bermanfaat bagi pengambilan kebijakan khususnya yang menyangkut kebijakan di wilayah Kecamatan Jatipuro.

Jatipuro, 31 Desember 2022

CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19760307 199903 1 004